



PUTUSAN

Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal dan lahir, Taba Renah, 17 November 1997, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Pemohon**

melawan

Termohon, Tempat tanggal dan lahir, Aur Gading, 06 Maret 1998, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 180/Pdt.G.G/2019/PA.AGM. pada yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 142/3/X/2014 tertanggal 2 Oktober 2014, pada saat menikah Pemohon berstatus jekaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tanggal 04 Februari 2016, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas;
 2. Setelah beberapa hari Termohon pergi tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha datang untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon menolak dan mengatakan ingin bercerai saja;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

-apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noprian NIK 17090517119700001 yang dikeluarkan oleh Duk Capil Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegeken, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 142/3/X/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 2 Oktober

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umu 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adala tetangga Pemohon sejak sudah lama sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah sampai keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun yang lalu;
 - Bahewa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi menurut Pemohon kepada saksi penyebab perselisihan karena Termohon egois dan tidak mau menerima nasihat Pemohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah karena saksi sudah lebih dari 9 bulan tidak melihat lagi Termohon berada di tempat kediaman bersamanya di rumah orang tua Pemohon



dan menurut keterangan Pemohon Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Desa Aur Gading;

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sering berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Tamba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 1 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah karena saksi sudah lebih dari 9 bulan tidak melihat lagi Termohon berada di tempat kediaman bersamanya di rumah orang tua Pemohon dan menurut keterangan Pemohon Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Desa Aur Gading;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak saling pedulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sering berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas akaibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2.) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 1 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya selengkapny telah tercatat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa di persidangan sorang demi seorang dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi satu sama lain isinya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materi sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, mereka terdiri dari dua orang saksi yang telah memenuhi batas minimal saksi sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan, penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2014 dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juniu 2018 tidak reukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar an dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 9 bulan lebih dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) sampai poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan JUNI 2018 dan sejak berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga, hal ini menunjukkan tidak adanya kedamaian antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, maka

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 180/P.Dt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 325.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 421.000,00 |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)